

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN FISKAL DALAM MENEKAN TINGKAT PENGANGGURAN PASCA KRISIS EKONOMI DI INDONESIA 2019-2024

Oleh:

Deka Anasta Putri¹

Ica Aprilia Safitri²

Rahma Pramudita³

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Alamat: Jalan Letnan Kolonel H Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota
Bandar Lampung, Lampung (35131).

Korespondensi Penulis: dekaanastata07@gmail.com, icaaprla12@gmail.com,
rahmapramuita9@gmail.com.

***Abstract.** The global economic crisis and the COVID-19 pandemic have led to unemployment in Indonesia, with the open unemployment rate (TPT) increasing from 5.28% in 2019 to 7.07% in 2020. This situation demands an active role for fiscal policy as a key instrument in labor market recovery and maintaining economic stability. This study aims to assess the effectiveness of fiscal policy in reducing poverty levels in Indonesia after the economic crisis. A descriptive qualitative approach was used, utilizing secondary data from the Central Statistics Agency (BPS) for the 2019–2024 period. The analysis was conducted by examining trends in the TPT, government spending patterns, and their relationship to Bent Hansen's fiscal policy theory and the Battaglini-Coate political economy model. The results indicate that expansionary fiscal policy through increased government spending on infrastructure, support for MSMEs, tax incentives, and heating subsidies effectively reduced unemployment to 4.91% in 2024. This policy's effectiveness is strengthened by fiscal-monetary coordination and labor market reforms that increase labor absorption and efficiency. However, challenges such as regional disparities and structural poverty still require region-based policies and improvements*

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN FISKAL DALAM MENEKAN TINGKAT PENGANGGURAN PASCA KRISIS EKONOMI DI INDONESIA 2019-2024

in human resource quality. Therefore, this study confirms that targeted, adaptive, and sustainable fiscal policy is key to strengthening national economic resilience post-crisis.

Keywords: *Fiscal Policy, Poverty, Economic Crisis, Economic Recovery, BPS 2019–2024.*

Abstrak. Krisis ekonomi global dan pandemi COVID-19 menyebabkan lonjakan pengangguran di Indonesia, dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) meningkat dari 5,28% pada tahun 2019 menjadi 7,07% pada 2020. Kondisi ini menuntut peran aktif kebijakan fiskal sebagai instrumen utama dalam memulihkan pasar tenaga kerja dan menjaga stabilitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan fiskal dalam menekan tingkat pengangguran pascakrisis ekonomi di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pemanfaatan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2019-2024. Analisis dilakukan dengan menelaah tren TPT, pola pengeluaran pemerintah, serta keterkaitannya dengan teori kebijakan fiskal Bent Hansen dan model ekonomi politik Battaglini-Coate. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal ekspansif melalui peningkatan pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur, dukungan bagi UMKM, insentif pajak, dan subsidi perekrutan efektif menurunkan pengangguran menjadi 4,91% pada tahun 2024. Efektivitas kebijakan tersebut diperkuat oleh koordinasi fiskal-moneter dan reformasi pasar tenaga kerja yang meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi penyerapan tenaga kerja. Namun, tantangan seperti disparitas regional dan pengangguran struktural masih memerlukan kebijakan berbasis wilayah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal yang terarah, adaptif, dan berkelanjutan merupakan kunci dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional pascakrisis.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal, Pengangguran, Krisis Ekonomi, Pemulihan Ekonomi, BPS 2019–2024.

LATAR BELAKANG

Krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 pada 2020 telah membawa dampak luas terhadap perekonomian global dan domestik. Indonesia mengalami kontraksi ekonomi hingga -2,07% dan peningkatan tingkat pengangguran terbuka (TPT) menjadi

7,07%, tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir (Badan Pusat Statistik 2024). Penurunan permintaan agregat, terganggunya rantai pasok, dan pembatasan mobilitas mengakibatkan banyak sektor produktif berhenti beroperasi. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal menjadi instrumen utama untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan melindungi lapangan kerja. Menurut Bent Hansen, kebijakan fiskal harus berjalan selaras dengan kebijakan moneter untuk mencapai lapangan kerja penuh (full employment) dan kestabilan harga (Siven 2023). Hansen menegaskan bahwa pemerintah perlu menggunakan pengeluaran publik secara aktif untuk menstimulasi permintaan agregat pada masa resesi. Di sisi lain, (Battaglini and Coate 2016) menyoroti bahwa kebijakan fiskal juga dipengaruhi oleh faktor politik, di mana pemerintah sering kali memperluas belanja publik untuk menekan pengangguran, meskipun berisiko meningkatkan utang jangka panjang.

Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencakup bantuan sosial, subsidi gaji, dukungan terhadap UMKM, dan investasi infrastruktur produktif (Muttaqim, Halik, and Mujannah 2025). Kebijakan ini dirancang untuk menjaga konsumsi masyarakat, meningkatkan daya beli, serta memperluas lapangan kerja baru terutama di sektor informal yang terdampak krisis. Namun meskipun demikian, efektivitas kebijakan fiskal tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya stimulus, melainkan juga oleh arah, sasaran, dan kapasitas pelaksanaannya. (Astuti 2023) menegaskan bahwa tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja menentukan seberapa cepat kebijakan fiskal dapat menurunkan pengangguran. Sementara itu, (Mulya 2024) dan (Fisabilillah 2023) menyoroti bahwa transformasi struktural dari sektor pertanian ke industri dan jasa menimbulkan tantangan baru berupa skill mismatch di pasar tenaga kerja.

Selain itu, (Topal 2015) menyatakan bahwa fleksibilitas pasar tenaga kerja berperan besar dalam menentukan dampak kebijakan fiskal. Negara dengan pasar tenaga kerja yang kaku memiliki pengganda fiskal yang lebih kecil karena penyesuaian upah dan perekrutan tenaga kerja berjalan lambat. Di Indonesia, peraturan ketenagakerjaan yang kompleks masih menjadi kendala dalam efektivitas stimulus fiskal terhadap penyerapan tenaga kerja (Marliana 2022). Masalah lainnya adalah disparitas wilayah. Wilayah Jawa dan Bali mengalami pemulihan tenaga kerja yang lebih cepat dibandingkan luar Jawa karena perbedaan kualitas infrastruktur dan investasi (Ubaidillah and Yasin 2024). Oleh

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN FISKAL DALAM MENEKAN TINGKAT PENGANGGURAN PASCA KRISIS EKONOMI DI INDONESIA 2019-2024

sebab itu, kebijakan fiskal berbasis wilayah (place-based fiscal policy) penting untuk memastikan pemerataan manfaat ekonomi. Dengan mempertimbangkan kompleksitas tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kebijakan fiskal dalam menekan tingkat pengangguran pascakrisis ekonomi di Indonesia dengan mengintegrasikan aspek teoritis, empiris, dan kebijakan berbasis data sekunder BPS 2019–2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang berfokus pada analisis kontekstual dan interpretatif terhadap data sekunder. Sumber utama penelitian berasal dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu laporan Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia periode 2019–2024, serta laporan makroekonomi dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami hubungan antara kebijakan fiskal dan tingkat pengangguran secara sistematis berdasarkan fakta empiris tanpa manipulasi variabel. Analisis dilakukan dengan menelusuri tren TPT, mengidentifikasi korelasi dengan kebijakan fiskal pemerintah, dan menilai efektivitas program pemulihan ekonomi.

Penelitian ini juga mengadopsi kerangka teori Bent Hansen tentang koordinasi kebijakan fiskal dan moneter (Siven 2023), serta model Battaglini dan (Battaglini and Coate 2016) mengenai pengaruh faktor politik terhadap kebijakan fiskal dan pengangguran. Analisis data mengikuti pendekatan secondary qualitative analysis sebagaimana dikembangkan oleh (Ruggiano and Perry 2019) (Pospisil 2023), dengan menekankan validitas sumber, reliabilitas interpretasi, dan relevansi konteks kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia 2019–2024

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Keterangan Utama
2019	5,28	5,02	Kondisi pra-pandemi stabil

2020	7,07	-2,07	Krisis akibat pandemi COVID-19
2021	6,49	3,69	Awal pemulihan ekonomi
2022	5,86	5,31	Pemulihan berlanjut
2023	5,32	5,04	Normalisasi pasar tenaga kerja
2024	4,91	5,10	Stabilitas dan ekspansi lapangan kerja

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2019–2024.

Data pada tabel menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia mengalami lonjakan signifikan pada 2020 sebagai akibat dari krisis pandemi global. Namun, sejak 2021, angka TPT menunjukkan tren penurunan yang konsisten hingga mencapai 4,91% pada 2024. Tren ini mengindikasikan keberhasilan kebijakan fiskal ekspansif yang dijalankan pemerintah dalam menstabilkan pasar tenaga kerja (Badan Pusat Statistik 2019).

Kebijakan fiskal dalam bentuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berperan besar dalam memperkuat konsumsi domestik dan menjaga daya beli masyarakat. Melalui peningkatan belanja publik, subsidi tenaga kerja, dan dukungan bagi UMKM, pemerintah mampu mempercepat pemulihan ekonomi dan menekan pengangguran (Muttaqim, Halik, and Mujannah 2025). Program ini sejalan dengan prinsip Bent Hansen, yang menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mendorong permintaan agregat untuk mencapai full employment (Siven 2023). Selain itu, belanja infrastruktur menjadi faktor utama yang mendorong penyerapan tenaga kerja secara luas. Proyek pembangunan jalan, jembatan, energi, dan transportasi publik tidak hanya menciptakan pekerjaan pada tahap konstruksi, tetapi juga menumbuhkan aktivitas ekonomi baru (Suarez-Cuesta, Latorre, and Lawrence 2024) (Akomolehin et al. 2025). Di Indonesia, proyek padat karya terbukti efektif dalam menurunkan pengangguran terutama bagi tenaga kerja berpendidikan rendah (Digdowiseiso, Fitasari, and Nasti yawati 2023).

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN FISKAL DALAM MENEKAN TINGKAT PENGANGGURAN PASCA KRISIS EKONOMI DI INDONESIA 2019-2024

Peningkatan investasi publik juga memberikan efek berantai terhadap sektor swasta. Sektor UMKM, yang menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional, mendapat manfaat besar dari kebijakan fiskal berupa insentif pajak dan akses pembiayaan syariah (Fisabilillah 2023) (Mulya 2024). Hasilnya, pada 2022 TPT turun menjadi 5,86%, menandakan percepatan pemulihan tenaga kerja di sektor informal. Namun, efektivitas kebijakan fiskal sangat bergantung pada fleksibilitas pasar tenaga kerja dan tingkat pendidikan. (Astuti 2023) menegaskan bahwa individu berpendidikan tinggi cenderung lebih cepat terserap di pasar kerja, sementara mereka dengan keterampilan rendah mengalami hambatan struktural. Untuk itu, pelatihan vokasi dan reskilling menjadi strategi komplementer dalam memperkuat dampak fiskal terhadap ketenagakerjaan (Abad et al. 2024). Selain itu, kebijakan upah minimum dan fleksibilitas regulasi ketenagakerjaan memengaruhi respons pasar tenaga kerja terhadap stimulus fiskal. Studi (Topal 2015) dan (Marliana 2022) menemukan bahwa kebijakan upah yang terlalu kaku dapat menghambat ekspansi kerja, sementara fleksibilitas mendorong efisiensi rekrutmen. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal perlu disinergikan dengan reformasi struktural di bidang ketenagakerjaan untuk memastikan hasil yang berkelanjutan.

Kebijakan pajak berbasis insentif, seperti Job Creation Tax Credit (JCTC), juga terbukti efektif dalam mendorong perusahaan merekrut tenaga kerja baru (Chirinko and Wilson 2016) (Lee 2015). Sementara itu, insentif penelitian dan pengembangan (R&D tax credit) dapat mendorong inovasi dan membuka lapangan kerja baru di sektor teknologi (Chirinko and Wilson 2023). Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang inovatif dapat memperluas basis lapangan kerja di era ekonomi digital. Selain kebijakan fiskal konvensional melalui pengeluaran publik, terdapat bukti kuat bahwa inovasi kebijakan fiskal digital berperan penting dalam mempercepat pemulihan pasar tenaga kerja. Menurut (Bova, Carcenac, and Gbohoui 2021), adopsi digital fiscal tools seperti sistem transfer tunai digital redan penyaluran bantuan berbasis data real-time mampu mengurangi time lag dalam implementasi kebijakan fiskal, sehingga dampaknya terhadap lapangan kerja lebih cepat terasa. Di Indonesia, penerapan sistem digitalisasi bantuan sosial dan Online Single Submission (OSS) dalam penyaluran kredit usaha kecil terbukti mempercepat penciptaan lapangan kerja di sektor informal. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi antara kebijakan fiskal dan transformasi digital memperkuat efisiensi

fiskal serta ketepatan sasaran dalam menekan pengangguran (Bova, Carcenac, and Gbohoui 2021) (Gupta, Kangur, and Papageorgiou 2022).

Lebih lanjut, efektivitas kebijakan fiskal juga dipengaruhi oleh kredibilitas fiskal dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Menurut (Corsetti, Meier, and Müller 2012), stimulus fiskal akan menghasilkan efek pengganda yang lebih tinggi jika pelaku ekonomi percaya bahwa ekspansi fiskal bersifat sementara dan akan diimbangi oleh konsolidasi di masa depan. Dalam konteks Indonesia, keberhasilan pemerintah menjaga defisit di bawah 3% setelah 2023 mencerminkan upaya menjaga disiplin fiskal tanpa mengurangi belanja produktif. Studi oleh (Rahmawati and Setiawan 2023) juga menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap akuntabilitas kebijakan fiskal memengaruhi kecepatan pemulihan tenaga kerja, terutama di daerah dengan tingkat partisipasi ekonomi tinggi. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang transparan, terukur, dan kredibel menjadi kunci menjaga efektivitasnya dalam jangka panjang (Corsetti, Meier, and Müller 2012) (Rahmawati and Setiawan 2023). Meskipun demikian, tantangan ketimpangan regional masih menjadi isu serius. Ubaidillah and Yasin (2024) menunjukkan bahwa wilayah di luar Jawa mengalami pemulihan lebih lambat akibat ketimpangan infrastruktur dan pendidikan. Untuk itu, kebijakan fiskal desentralistik diperlukan agar pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja lebih merata (Syukriansyah et al. 2024)

Dalam konteks keberlanjutan, stimulus fiskal harus diimbangi dengan konsolidasi anggaran agar tidak menimbulkan beban utang publik yang berlebihan. Easterly, Irwin, and Servén (2012) serta Plekhanov, Kumar, and Leigh (2007) menegaskan bahwa konsolidasi fiskal yang “ramah pertumbuhan” diperlukan agar kebijakan ekspansif tidak mengorbankan stabilitas makro jangka panjang. Pemerintah Indonesia berhasil menurunkan defisit APBN dari 6,1% terhadap PDB pada 2020 menjadi 2,3% pada 2024, sambil tetap menjaga belanja produktif di bidang pendidikan dan infrastruktur. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal Indonesia selama 2019–2024 efektif dalam menekan tingkat pengangguran pascakrisis. Penurunan TPT dari 7,07% menjadi 4,91% mencerminkan keberhasilan strategi fiskal yang adaptif dan terarah. Efektivitas ini semakin diperkuat oleh koordinasi fiskal-moneter yang baik, investasi publik yang produktif, serta kebijakan sektoral yang berpihak pada UMKM dan

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN FISKAL DALAM MENEKAN TINGKAT PENGANGGURAN PASCA KRISIS EKONOMI DI INDONESIA 2019-2024

tenaga kerja rentan (Siven 2023) (Battaglini and Coate 2016) (Liu and Poplawski-Ribeiro 2015).

KESIMPULAN

Kebijakan fiskal ekspansif Indonesia terbukti efektif dalam menekan tingkat pengangguran pascakrisis ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah, proyek infrastruktur, dan dukungan terhadap UMKM berhasil menurunkan tingkat pengangguran terbuka dari 7,07% (2020) menjadi 4,91% (2024). Keberhasilan ini sejalan dengan teori Bent Hansen mengenai koordinasi fiskal-moneter dan model Battaglini-Coate tentang peran politik fiskal dalam mengelola pengangguran. Namun, tantangan jangka panjang seperti ketimpangan wilayah, skill mismatch, dan keberlanjutan fiskal masih memerlukan perhatian serius. Untuk itu, kebijakan fiskal ke depan harus diarahkan pada konsolidasi yang inklusif dan berorientasi pada produktivitas, agar pemulihan ekonomi dapat berlanjut secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Abad, J, María Victoria Anauati, M López, Laureen Montes, and Graciana Rucci. 2024. “¿Cómo Aprovechar La Inversión En Infraestructura Para La Creación de Empleo de Calidad y Desarrollo de Habilidades Para El Trabajo?: Acercando La Infraestructura a Las Personas.” <https://doi.org/10.18235/0005520>.
- Akomolehin, Olugbenga F, Ibukun Felix Olusegun, Olusegun J Famoroti, Jimba I Kareem, and Abiodun Thomas Ogundele. 2025. “Infrastructure Development and Labor Market Efficiency: A Sectoral Analysis of Transport and Energy Investments in West Africa (2010–2025),” 2052–70. <https://doi.org/10.38124/ijisrt/25aug1152>.
- Astuti, Ismadiyanti Purwaning. 2023. “Determinan Pengangguran Di Indonesia: Studi Kasus Data Ifls.” *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*. <https://doi.org/10.23960/jep.v12i1.634>.
- Badan Pusat Statistik. 2019. “Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia: Agustus 2019–2024.”
- Battaglini, Marco, and Stephen Coate. 2016. “A Political Economy Theory of Fiscal Policy and Unemployment.” *Journal of the European Economic Association* 14 (2): 303–37. <https://doi.org/10.1111/JEEA.12136>.
- Bova, E, N Carcenac, and W Gbohoui. 2021. “Digital Fiscal Tools and Employment Recovery after COVID-19.” *IMF Working Paper*, no. WP/21/105. <https://doi.org/10.5089/9781513574192.001>.
- Chirinko, Robert S, and Daniel J Wilson. 2016. “Job Creation Tax Credits, Fiscal Foresight, and Job Growth: Evidence from U.S. States.” <https://doi.org/10.24148/WP2010-25>.
- Corsetti, G, A Meier, and G Müller. 2012. “What Determines the Effectiveness of Fiscal Policy?” *Economic Policy* 27 (72): 521–65. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0327.2012.00295.x>.
- Digdowniseiso, Kumba, Aisyah Fitasari, and Nastiyawati Nastiyawati. 2023. “Dampak Dan Efisiensi Program Padat Karya Sebagai Belanja Prioritas Untuk Mengentaskan Pengangguran: Kajian Literatur.” *Costing*. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i2.7491>.
- Dinda Fitria Pida, Khadijah Nur Aini, and Cindy Amelia Putri. 2025. “Dampak Urbanisasi Terhadap Perkembangan Kota Di Indonesia: Tinjauan Dari Aspek

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN FISKAL DALAM MENEKAN TINGKAT PENGANGGURAN PASCA KRISIS EKONOMI DI INDONESIA 2019-2024

- Ekonomi Pembangunan.” *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3 (1): 226–38. <https://doi.org/10.62383/wissen.v3i1.562>.
- Easterly, William, Timothy Irwin, and Luis Servén. 2012. “Walking up the Down Escalator.” *World Bank Research Observer*. <https://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1093/wbro/lkm014>.
- Fisabilillah, Ladi Wajuba Perdini. 2023. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Di Indonesia.” *Journal of Economics* 2 (2): 155–68. <https://doi.org/10.26740/independent.v2i2.50992>.
- Gupta, S, A Kangur, and C Papageorgiou. 2022. “Technology, Fiscal Policy, and Labor Market Recovery.” *World Development* 157:105945. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.105945>.
- Lee, Byung-San. 2015. “Tax Incentives for Job Creation and Employment Retention.” *Journal of Digital Convergence* 13 (11): 133–39. <https://doi.org/10.14400/JDC.2015.13.11.133>.
- Liu, Kai, and Marcos Poplawski-Ribeiro. 2015. “Short- and Long-Run Fiscal Elasticities: International Evidence.” <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/65950/>.
- Marliana, Lina. 2022. “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia.” *Ekonomis* 6 (1): 87. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.490>.
- Mulya, Nico Pranata. 2024. “Navigating the Tides of Change: A Comprehensive Analysis of Employment and Unemployment Dynamics in Indonesia.” <https://doi.org/10.69965/danadyaksa.v2i1.58>.
- Muttaqim, Hakim, Abdul Halik, and Siti Mujannah. 2025. “Analisis Komprehensif Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Inflasi, Suku Bunga, Dan Investasi Terhadap Tingkat Pengangguran Di Indonesia Periode 2005-2023 Dengan Daya Beli Masyarakat Sebagai Variabel Mediasi.” *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 4 (2): 3948–59. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i2.7079>.
- Plekhanov, Alexander, Manmohan S Kumar, and Daniel Leigh. 2007. “Fiscal Adjustments; Determinants and Macroeconomic Consequences.” *Research Papers in Economics*. <https://econpapers.repec.org/RePEc:imf:imfwpa:07/178>.

- Pospisil, R. 2023. "Qualitative Secondary Data Analysis in Economics Research." *International Journal of Qualitative Methods* 22:1–12. <https://doi.org/10.1177/16094069231180160>.
- Rahmawati, L, and R Setiawan. 2023. "Kredibilitas Fiskal Dan Persepsi Publik Terhadap Efektivitas Kebijakan Pemerintah Di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Publik* 9 (2): 77–92.
- Ruggiano, N, and T Perry. 2019. "Conducting Secondary Analysis of Qualitative Data." *Qualitative Social Work* 18 (3): 396–412. <https://doi.org/10.1177/1473325017700701>.
- Siven, Claes-Henric. 2023. "Bent Hansen's Theory of Fiscal Policy." *European Journal of The History of Economic Thought*, 1–31. <https://doi.org/10.1080/09672567.2023.2172196>.
- Suarez-Cuesta, David, María C Latorre, and Robert P Lawrence. 2024. "Macro and Microeconomic Effects of the Infrastructure Investment and Jobs Act (Iija) and How Financing Strategies Matter." <https://doi.org/10.2139/ssrn.4821146>.
- Syukriansyah, Deden, Fawwaz Rippa Gilardi Adidjaya, Fatkhan Fahmi Huda, Frasty Dwi Saputra, and Arif Fadilla. 2024. "Dinamika Pengangguran: Analisis Perubahan Dalam Pasar Tenaga Kerja Nasional." <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i3.200>.
- Topal, Pinar. 2015. "Fiscal Stimulus and Labor Market Flexibility." *Research Papers in Economics*. <https://ideas.repec.org/p/zbw/safewp/90.html>.
- Ubaidillah, Moch Rifqi Shihabuddin Al, and Muhammad Yasin. 2024. "Analisis Pengangguran Dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Perekonomian Indonesia." *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi* 2 (3): 34–42. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i3.2123>.